

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 12.186.573 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 30.891.356.487 atau mencapai 92,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 33.398.852.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.622.415.364 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 149.231.356; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 11.859.035.646; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 614.148.362.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 321.113.640 dan Rp. 12.301.301.724.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus /defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp. 12.186.573, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 34.622.191.317 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (34.610.004.744). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 72.447.780 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (34.537.556.964).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp. 17.918.635.689 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (34.537.556.964) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (1.234.030.126) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 30.154.253.125 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. 12.301.301.724.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	12.186.573	0,00	10.093.672
JUMLAH PENDAPATAN		-	12.186.573	0,00	10.093.672
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.872.166.000	8.646.885.506	97,46	7.668.322.611
Belanja Barang	B.4	24.462.686.000	22.202.063.481	90,76	12.706.552.424
Belanja Modal	B.5	64.000.000	42.407.500	66,26	496.238.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		33.398.852.000	30.891.356.487	92,49	20.871.113.035

II. NERACA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	219.225.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	149.231.356	1.679.987.081
Jumlah Aset Lancar		149.231.356	1.899.212.081
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.198.190.000	2.198.190.000
Peralatan dan Mesin	C.15	11.551.427.229	13.186.334.137
Gedung dan Bangunan	C.16	8.793.256.748	8.763.831.748
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	257.070.499	176.544.159
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(10.940.908.830)	(9.220.708.172)
Jumlah Aset Tetap		11.859.035.646	15.104.191.872
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	2.016.058.487	1.187.004.987
Aset Lain-Lain	C.22	641.577.468	544.793.468
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(2.043.487.593)	(521.886.147)
Jumlah Aset Lainnya		614.148.362	1.209.912.308
JUMLAH ASET		12.622.415.364	18.213.316.261
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	321.113.640	294.680.572
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		321.113.640	294.680.572
JUMLAH KEWAJIBAN		321.113.640	294.680.572
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	12.301.301.724	17.918.635.689
JUMLAH EKUITAS		12.301.301.724	17.918.635.689
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.622.415.364	18.213.316.261

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	12.186.573	6.844.172
JUMLAH PENDAPATAN		12.186.573	6.844.172
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.661.818.566	7.759.233.881
Beban Persediaan	D.3	1.777.507.354	1.067.246.541
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.221.042.677	2.741.481.558
Beban Pemeliharaan	D.5	324.341.500	299.848.037
Beban Perjalanan Dinas	D.6	18.508.870.462	7.697.674.652
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	542.544.486
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.128.610.758	1.992.139.754
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		34.622.191.317	22.100.168.909
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(34.610.004.744)	(22.093.324.737)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		88.058.344	3.249.500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		15.610.564	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		72.447.780	3.249.500
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(34.537.556.964)	(22.090.075.237)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPNP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(34.537.556.964)	(22.090.075.237)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	17.918.635.689	14.679.058.908
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(34.537.556.964)	(22.090.075.237)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	15.644.943
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(1.234.030.126)	39.189.975
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(1.234.030.126)	54.834.918
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	30.154.253.125	25.274.817.100
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(5.617.333.965)	3.239.576.781
EKUITAS AKHIR	E.6	12.301.301.724	17.918.635.689

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar
Hukum*

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi

Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
25. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 42/Pb/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga

35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara
36. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir T.A. 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2016

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Badan Pusat Statistik sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Lampung perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Indonesia.

BPS Provinsi Lampung dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Provinsi Lampung 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada

lingkungan BPS Provinsi Lampung akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Visi Pemerintah Provinsi Lampung 2015-2019 adalah “Lampung Maju dan Sejahtera 2019” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019, yaitu meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah; meningkatkan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial; meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama; meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan serta menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi, dan meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Untuk membantu mewujudkan RPJMD tersebut, dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Lampung akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Visi BPS Provinsi Lampung

Visi BPS Provinsi Lampung adalah “**Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua**”

Misi BPS Provinsi Lampung

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Lampung yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas untuk memenuhi kebutuhan data regional dan nasional melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan BPS Provinsi Lampung

Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Provinsi Lampung berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS dalam periode 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah :

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran :

1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;

1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;

1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;

1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu;

1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan

1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*), dengan indikator sasaran :

1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga

1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha.

1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha.

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik” adalah :

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*) dengan indikator sasaran :

2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS;

2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;

2.1.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS;

2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah :

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dengan indikator sasaran :

3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1.

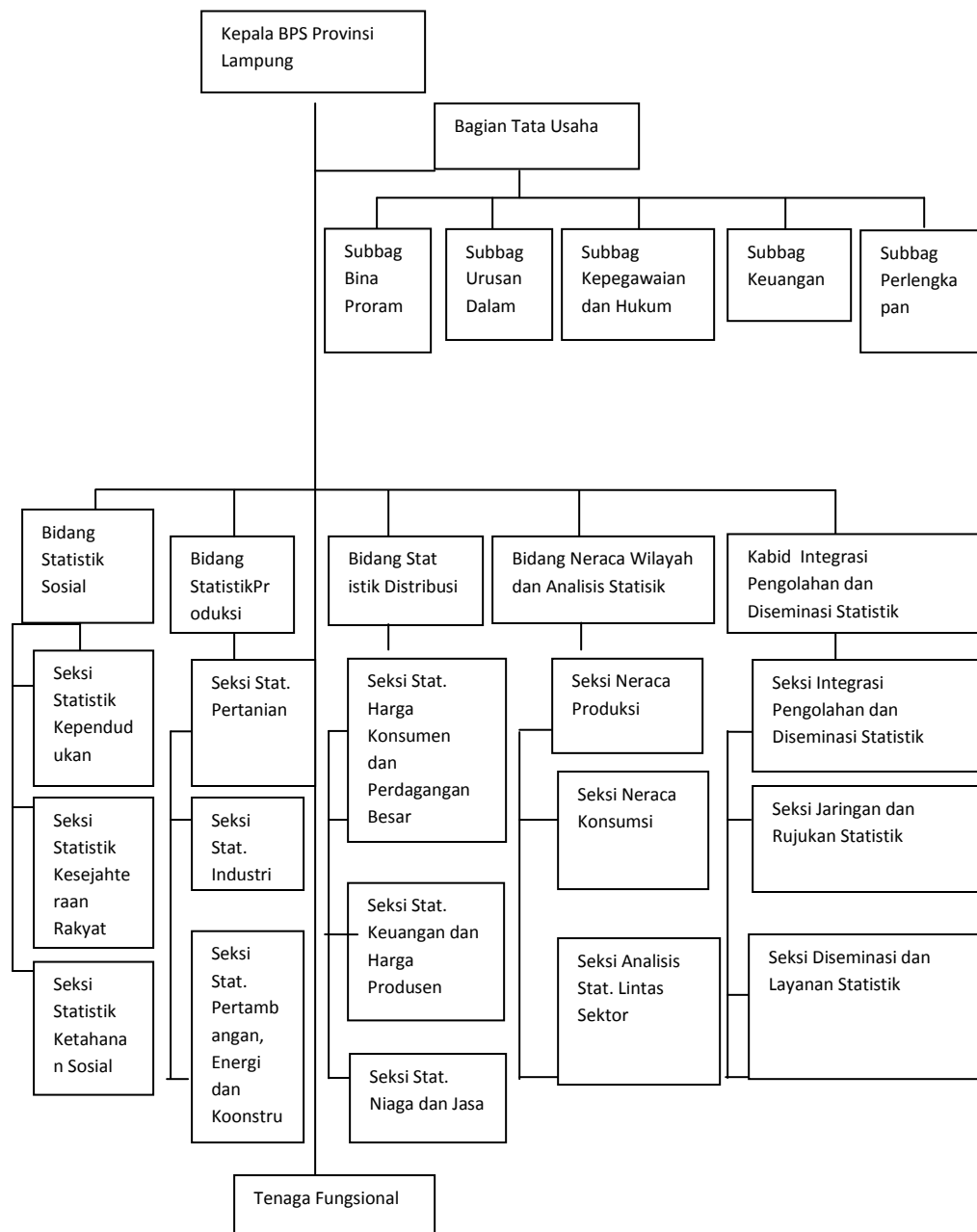
3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran :

3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat;

Susunan organisasi dan pimpinan unit kerja di lingkungan BPS Provinsi Lampung posisi per 31Desember 2016 sebagai berikut :

1. Kepala BPS Provinsi Lampung : Yeane Irmaningrum S, MA
2. Kepala Bagian Tata Usaha : Ir. Akhmad Nasrudin
(membawahi lima sub bagian)
3. Kepala Bidang Sosial : Mas'ud Rifai, SST
(membawahi tiga seksi)
4. Kepala Bidang Produksi : Aryanto, S.Si,MM
(membawahi tiga seksi)
5. Kepala Bidang Distribusi : Bambang Widjanarko, SP
(membawahi tiga seksi)
6. Kepala Bidang Neraca : Risma Pijayantini, S.Si.
(membawahi tiga seksi)
7. Kepala Bidang IPDS : Mochamad Saleh, S.Kom.
(membawahi tiga seksi)

Struktur Organisasi BPS Provinsi Lampung



A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.6. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran BPS Provinsi Lampung Tahun 2016 sesuai Surat Pengesahan DIPA Nomor DIPA 054.01.2.428321/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 39.194.722.000. Selama periode berjalan, BPS Provinsi Lampung telah mengadakan revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- Revisi I tanggal 14 Juni 2016 pada belanja barang, yaitu terjadi Revisi DIPA Antar Satker pada komponen (019) Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi Sebesar Rp. 543.011.000

Pagu anggaran semula Rp. 39.194.722.000 berkurang menjadi Rp. 38.651.711.000 dengan rincian per program sebagai berikut :

Nama Program				Anggaran Awal	Revisi	Anggaran Setelah Revisi I
Program	Kegiatan	Output	Jenis Belanja	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01	2886	003	Belanja Barang	121.315.000	-	121.315.000
01	2886	994	Belanja Pegawai	7.871.048.000	-	7.871.048.000
01	2886	994	Belanja Barang	1.941.265.000	-	1.941.265.000
02	2891	996	Belanja Modal	24.000.000	-	24.000.000
02	2891	997	Belanja Modal	285.000.000	-	285.000.000
06	2895	003	Belanja Barang	43.442.000	-	43.442.000
06	2895	004	Belanja Barang	108.610.000	-	108.610.000
06	2895	005	Belanja Barang	40.480.000	-	40.480.000
06	2895	006	Belanja Barang	244.640.000	-	244.640.000
06	2895	008	Belanja Barang	42.450.000	-	42.450.000
06	2895	009	Belanja Barang	1.111.094.000	-	1.111.094.000
06	2895	010	Belanja Barang	358.271.000	-	358.271.000
06	2895	013	Belanja Barang	153.389.000	-	153.389.000
06	2895	014	Belanja Barang	39.422.000	-	39.422.000
06	2895	015	Belanja Barang	559.068.000	-	559.068.000
06	2895	016	Belanja Barang	75.811.000	-	75.811.000
06	2895	018	Belanja Barang	101.573.000	-	101.573.000
06	2895	019	Belanja Barang	24.363.306.000	(543.011.000)	23.820.295.000
06	2895	020	Belanja Barang	609.892.000	-	609.892.000
06	2895	022	Belanja Barang	415.900.000	-	415.900.000
06	2895	023	Belanja Barang	186.875.000	-	186.875.000
06	2895	024	Belanja Barang	256.198.000	-	256.198.000
06	2895	025	Belanja Barang	216.940.000	-	216.940.000
06	2895	026	Belanja Barang	24.733.000	-	24.733.000
				39.194.722.000	(543.011.000)	38.651.711.000

- Revisi II tanggal 27 Juli 2016 Penghematan pada belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang, yaitu :Pengurangan pada belanja pegawai, belanja modal terhadap belanja modal peralatan dan mesin peralatan dan fasilitas perkantoran juga belanja barang terhadap Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Pengurangan pada revisi II merupakan penghematan yang mengurangi pagu.

Pagu anggaran semula Rp. 38.651.711.000 berkurang menjadi Rp. 31.545.320.000 dengan rincian per program sebagai berikut :

Nama Program				Anggaran Setelah Revisi I	Revisi	Anggaran Setelah Revisi II
Program	Kegiatan	Output	Jenis Belanja	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01	2886	003	Belanja Barang	121.315.000	(121.315.000)	-
01	2886	994	Belanja Pegawai	7.871.048.000	(852.414.000)	7.018.634.000
01	2886	994	Belanja Barang	1.941.265.000	(230.272.000)	1.710.993.000
02	2891	996	Belanja Modal	24.000.000	-	24.000.000
02	2891	997	Belanja Modal	285.000.000	(245.000.000)	40.000.000
06	2895	003	Belanja Barang	43.442.000	-	43.442.000
06	2895	004	Belanja Barang	108.610.000	65.079.000	173.689.000
06	2895	005	Belanja Barang	40.480.000	(5.299.000)	35.181.000
06	2895	006	Belanja Barang	244.640.000	(80.884.000)	163.756.000
06	2895	008	Belanja Barang	42.450.000	(42.450.000)	-
06	2895	009	Belanja Barang	1.111.094.000	(671.217.000)	439.877.000
06	2895	010	Belanja Barang	358.271.000	(350.371.000)	7.900.000
06	2895	013	Belanja Barang	153.389.000	(26.721.000)	126.668.000
06	2895	014	Belanja Barang	39.422.000	(3.935.000)	35.487.000
06	2895	015	Belanja Barang	559.068.000	(113.760.000)	445.308.000
06	2895	016	Belanja Barang	75.811.000	(30.600.000)	45.211.000
06	2895	018	Belanja Barang	101.573.000	(101.573.000)	-
06	2895	019	Belanja Barang	23.820.295.000	(3.569.064.000)	20.251.231.000
06	2895	020	Belanja Barang	609.892.000	(58.418.000)	551.474.000
06	2895	022	Belanja Barang	415.900.000	(415.900.000)	-
06	2895	023	Belanja Barang	186.875.000	(145.495.000)	41.380.000
06	2895	024	Belanja Barang	256.198.000	(80.707.000)	175.491.000
06	2895	025	Belanja Barang	216.940.000	(26.075.000)	190.865.000
06	2895	026	Belanja Barang	24.733.000	-	24.733.000
				38.651.711.000	(7.106.391.000)	31.545.320.000

- Revisi III tanggal 20 September 2016 yaitu berupa penghematan anggaran dan self blocking namun tidak merubah nilai pagu anggaran. Menindaklanjuti surat Sestama BPS Nomor B-232/BPS/2000/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Penegasan Tindak Lanjut Penghematan Anggaran Tahun 2016, dengan ini BPS Provinsi Lampung melakukan Self Blocking pada belanja barang sebesar Rp. 2.098.293.000.
- Revisi IV tanggal 25 November 2016 pada belanja pegawai yaitu : Penambahan pada belanja pegawai gaji dan tunjangan PNS, uang lembur dan belanja tunjangan khusus/kegiatan).

Pagu anggaran semula Rp. 31.545.320.000 bertambah menjadi Rp. 33.398.852.000 dengan rincian per program sebagai berikut :

Nama Program				Anggaran Setelah Revisi III	Revisi	Anggaran Setelah Revisi IV
Program	Kegiatan	Output	Jenis Belanja	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01	2886	003	Belanja Barang	-	-	-
01	2886	994	Belanja Pegawai	7.018.634.000	1.853.532.000	8.872.166.000
01	2886	994	Belanja Barang	1.710.993.000	-	1.710.993.000
02	2891	996	Belanja Modal	24.000.000	-	24.000.000
02	2891	997	Belanja Modal	40.000.000	-	40.000.000
06	2895	003	Belanja Barang	43.442.000	-	43.442.000
06	2895	004	Belanja Barang	173.689.000	-	173.689.000
06	2895	005	Belanja Barang	35.181.000	-	35.181.000
06	2895	006	Belanja Barang	163.756.000	-	163.756.000
06	2895	008	Belanja Barang	-	-	-
06	2895	009	Belanja Barang	439.877.000	-	439.877.000
06	2895	010	Belanja Barang	7.900.000	-	7.900.000
06	2895	013	Belanja Barang	126.668.000	-	126.668.000
06	2895	014	Belanja Barang	35.487.000	-	35.487.000
06	2895	015	Belanja Barang	445.308.000	-	445.308.000
06	2895	016	Belanja Barang	45.211.000	-	45.211.000
06	2895	018	Belanja Barang	-	-	-
06	2895	019	Belanja Barang	20.251.231.000	-	20.251.231.000
06	2895	020	Belanja Barang	551.474.000	-	551.474.000
06	2895	022	Belanja Barang	-	-	-
06	2895	023	Belanja Barang	41.380.000	-	41.380.000
06	2895	024	Belanja Barang	175.491.000	-	175.491.000
06	2895	025	Belanja Barang	190.865.000	-	190.865.000
06	2895	026	Belanja Barang	24.733.000	-	24.733.000
				31.545.320.000	1.853.532.000	33.398.852.000

BPS Provinsi Lampung telah melakukan revisi POK sebanyak 6 (enam) kali.

BPS Provinsi Lampung melakukan Self Blocking sebesar Rp. 2.098.293.000 yang tidak dapat dipergunakan untuk belanja. Dengan demikian realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 98,69 persen.

Realisasi
Pendapatan
Rp.
12.186.573

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 12.186.573 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Pendapatan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung terdiri dari Pendapatan Penjualan buku publikasi statistik dan data mentah statistik; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	-	10.348.950	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	1.837.623	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai YATL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang YATL	-	-	-
Jumlah	-	12.186.573	-

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan 20,73 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan penjualan buku publikasi statistik dan data mentah statistik sebesar 105,06 persen dan juga kenaikan 2,24 persen pada pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	NAIK (TURUN)
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	10.348.950	5.046.800	105,06
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.837.623	1.797.372	2,24
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai YATL	-	619.500	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang YATL	-	2.630.000	0,00
Jumlah	12.186.573	10.093.672	20,73

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
30.891.356.487

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 30.891.356.487 atau 92,49% dari anggaran belanja sebesar Rp. 33.398.852.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.872.166.000	8.647.343.393	97,47
Belanja Barang	24.462.686.000	22.206.563.481	90,78
Belanja Modal	64.000.000	42.407.500	66,26
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	33.398.852.000	30.896.314.374	92,51
Pengembalian		(4.957.887)	-
Jumlah	33.398.852.000	30.891.356.487	92,49

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi BelanjaTA 2016 mengalami kenaikan sebesar 48,01% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan pada belanja pegawai sebesar 12,76 persen yang disebabkan oleh penambahan pegawai di BPS

Provinsi Lampung serta adanya tunjangan hari raya 2016,

- Adanya kenaikan pada belanja barang yang dikarenakan BPS Provinsi Lampung melakukan kegiatan besar yaitu Sensus Ekonomi 2016 sebesar 74,73% khususnya pada pelatihan petugas listing SE2016

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.646.885.506	7.668.322.611	12,76
Belanja Barang	22.202.063.481	12.706.552.424	74,73
Belanja Modal	42.407.500	496.238.000	(91,45)
Jumlah	30.891.356.487	20.871.113.035	48,01

Tabel 7. Rincian anggaran dan belanja menurut program (Netto) per 31 Desember 2016

No.	Jenis Anggaran /Program	Belanja	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	51	8.872.166.000	8.646.885.506
		52	1.710.993.000	1.658.757.796
		53	-	-
Jumlah			10.583.159.000	10.305.643.302
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	51	-	-
		52	-	-
		53	64.000.000	42.407.500
Jumlah			64.000.000	42.407.500
3	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	51	-	-
		52	22.751.693.000	20.543.305.685
		53	-	-
Jumlah			22.751.693.000	20.543.305.685
TOTAL			33.398.852.000	30.891.356.487

Belanja
Pegawai Rp.
8.646.885.506

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.646.885.506 dan Rp. 7.668.322.611. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 12,76 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan BPS.
2. Adanya Tunjangan Hari Raya 2016.

Tabel 8. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.086.653.193	4.534.424.884	12,18
Belanja Tunj. Khusus & Belanj. Pegawai Transito	3.560.690.200	3.137.748.883	13,48
Jumlah Belanja Kotor	8.647.343.393	7.672.173.767	12,71
Pengembalian Belanja Pegawai	(457.887)	(3.851.156)	(88,11)
Jumlah Belanja	8.646.885.506	7.668.322.611	12,76

Pengembalian belanja pegawai pada BPS Provinsi Lampung senilai Rp. (457.887) yaitu berupa pengembalian belanja gaji pokok PNS senilai Rp. (304.500); pengembalian pembulatan gaji PNS senilai Rp. (387); dan pengembalian belanja uang makan PNS senilai Rp. (153.000).

Belanja Barang
Rp.

22.202.063.481

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.202.063.481 dan Rp. 12.706.552.424. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 74,73% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional sebesar 11,16 persen; belanja barang non operasional sebesar 7,45 persen dan belanja perjalanan dinas dalam negeri terutama pelatihan petugas listing SE2016 sebesar 140,51 persen. Belanja jasa dan

belanja barang persediaan pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 karena kegiatan publisitas SE2016 yang memerlukan belanja jasa dan barang persediaan sangat berkurang.

Tabel 9. Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	382.552.317	344.156.341	11,16
Belanja Barang Non Operasional	2.110.051.110	1.963.701.319	7,45
Belanja Jasa	497.714.242	645.442.432	(22,89)
Belanja Pemeliharaan	539.704.100	558.339.207	(3,34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	18.513.370.462	7.697.674.652	140,51
Belanja Barang Persediaan	163.171.250	1.497.238.473	(89,10)
Jumlah Belanja Kotor	22.206.563.481	12.706.552.424	74,76
Pengembalian Belanja	(4.500.000)	-	100,00
Jumlah Belanja	22.202.063.481	12.706.552.424	74,73

Pengembalian belanja barang yaitu berupa pengembalian uang pelatihan calon petugas SE2016 sebesar Rp. 4.500.000 dari akun belanja perjalanan dalam negeri.

Belanja Modal
Rp.
42.407.500

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.407.500 dan Rp. 496.238.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 91,45% dibandingkan TA 2015 disebabkan anggaran pada belanja modal TA 2016 lebih kecil dan adanya penghematan berupa self blocking sebesar Rp. 21.400.000.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.407.500	286.075.000	(85,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	210.163.000	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	42.407.500	496.238.000	-91,45
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	42.407.500	496.238.000	-91,45

Belanja Modal Tanah Rp. 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp. 42.407.500, mengalami penurunan sebesar 85,18 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp. 286.075.000. Belanja modal peralatan dan mesin yang sudah terealisasi pada 31 Desember 2016 berupa pembelian A.C. Split, Panaboard dan External.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Printer	-	193.450.000	0,00
Meubelair/Lemari Display	-	13.065.000	0,00
Mimbar/Podium	-	5.000.000	0,00
Lemari Es	-	2.500.000	0,00
Kamera	-	4.950.000	0,00
kendaraan	-	-	0,00
Perkakas Kantor Lainnya	-	3.500.000	0,00
Switcher/Patch Panel	-	29.425.000	0,00
Background	-	28.000.000	0,00
Scanner	-	6.185.000	0,00
A.C.Split	5.857.500	-	100,00
Panaboard	21.550.000	-	100,00
External	15.000.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	42.407.500	286.075.000	-85,18
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	42.407.500	286.075.000	-85,18

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.
0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 210.163.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dikarenakan pada tahun 2016 tidak ada anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	66.147.000	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	144.016.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	210.163.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	210.163.000	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp. 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja Modal
Lainnya Rp. 0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja
Bantuan
Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp. 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp. 0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0.

Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp. 0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp. 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 219.225.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara

penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Sewa Baliho SE2016	-	164.500.000
Sewa Gudang	-	54.725.000
Jumlah	-	219.225.000

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp. 149.231.356

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 149.231.356 dan Rp. 1.679.987.081.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	149.231.356	1.530.354.081
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	149.558.000
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	75.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	149.231.356	1.679.987.081

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp. 0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp.

2.198.190.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 2.198.190.000 dan Rp. 2.198.190.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2016. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	2.198.190.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2016	2.198.190.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Tanah TA 2016

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1367m2	Jl. Way Tataian no 12A Pahoman	Rp 1.189.290.000
2	450m2	Jl. Gajah mada Gg. Elang	Rp 256.500.000
3	1200m2	Jl. Basuki Rahmat No 54	Rp 475.200.000
4	700m2	Jl. Basuki Rahmat No 54	Rp 277.200.000
Jumlah			2.198.190.000

Peralatan

dan Mesin

Rp.

11.551.427.2

29

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp. 11.551.427.229 dan Rp. 13.186.334.137. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	13.186.334.137
Mutasi tambah:	
Pembelian	42.407.500
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	295.728.564
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(1.846.833.972)
Penghentian dari penggunaan	(96.784.000)
Koreksi Pencatatan	(29.425.000)
Saldo per 31 Desember 2016	11.551.427.229
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(9.810.420.138)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	1.741.007.091

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian berupa 1 buah panaboard senilai Rp. 21.550.000; 20 buah external Rp. 15.000.000 dan 1 buah A.C.Split senilai Rp. 5.857.500.
- b. Transfer masuk berupa 8 buah crimping tolls senilai Rp. 12.724.800 Sesuai BAST nomor : 02520.53/BASTP-BMN/6/2016, Tanggal : 28 Juni 2016 dari Biro Umum Badan Pusat Statistik; 14 unit P.C Unit senilai Rp. 188.772.374 Sesuai BAST nomor : BASTP-228/BPS/2520/8/2016, Tanggal : 6 Agustus 2016 dari Biro Umum Badan Pusat Statistik; 14 Mesin Absensi senilai Rp. 82.775.000 Sesuai BAST nomor : BASTP-196/BPS/2520/8/2016, Tanggal : 26 Agustus 2016 dari Biro Umum Badan Pusat Statistik dan 1 buah Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester) senilai Rp. 11.456.390 Sesuai BAST nomor : BASTP-283/BPS/2520/12/2016, Tanggal : 23 Desember 2016 dari Biro Umum Badan Pusat Statistik.

Mutasi kurang peralatan dan mesin berupa:

- a. Transfer keluar :
 - berupa 14 buah scanner senilai Rp. (328.956.572) Sesuai nomor : B-029/BPS/18515/03/2016 tanggal : 4 Maret 2016 dari BPS Provinsi Lampung ke BPS Kota Bandar Lampung sebanyak 1 buah senilai

Rp.(23.496.898); BPS Kota Metro sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Mesuji sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Way Kanan sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898); BPS Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 buah senilai Rp. (23.496.898);

- 14 buah firewall senilai Rp. (1.300.552.000) Sesuai nomor : B-029/BPS/18515/03/2016 tanggal : 4 Maret 2016 dari BPS Provinsi Lampung ke BPS Kota Bandar Lampung sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kota Metro sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (93.830.000); BPS Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS

- Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 buah senilai Rp. (93.830.000); BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (93.830.000); BPS Kabupaten Mesuji sebanyak 1 buah senilai Rp. (93.830.000); BPS Kabupaten Way Kanan sebanyak 1 buah senilai Rp. (93.830.000); BPS Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000); BPS Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 buah senilai Rp. (92.378.000);
- 14 buah switch senilai Rp. (129.375.400) Sesuai nomor : B-029/BPS/18515/03/2016 tanggal : 4 Maret 2016 dari BPS Provinsi Lampung ke BPS Kota Bandar Lampung sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kota Metro sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Mesuji sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Way Kanan sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100); BPS Kabupaten

- Pesawaran sebanyak 1 buah senilai Rp. (9.241.100);
- 14 unit Mesin Absensi senilai Rp. (82.775.000) Sesuai nomor : B-062/BPS/18515/09/2016 tanggal : 14 September 2016 dari BPS Provinsi Lampung ke BPS Kota Bandar Lampung sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kota Metro sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Tanggamus sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Mesuji sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Way Kanan sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500); BPS Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 buah senilai Rp. (5.912.500).
 - 1 buah Printer senilai Rp. (5.175.000) Sesuai nomor : B-086/BPS/18515/11/2016 tanggal : 7 November 2016 dari BPS Provinsi Lampung ke BPS Kabupaten Pesawaran.
- b. Penghentian dari penggunaan yaitu berupa 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp. (93.000.000) dan 1 buah Tang Kombinasi senilai Rp. (3.784.000)

c. Koreksi pencatatan yaitu berupa 1 buah Switcher/Patch Panel senilai Rp. (29.425.000).

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan

C.16 Gedung dan Bangunan

*Rp.
8.793.256.748*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp. 8.793.256.748 dan Rp. 8.763.831.748. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	8.763.831.748
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	29.425.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	8.793.256.748
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(1.130.488.692)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	7.662.768.056

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas bangunan gedung kantor permanen senilai Rp. 29.425.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset Tetap Lainnya

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Rp.
257.070.499*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp. 257.070.499 dan Rp. 176.544.159. Aset tetap tersebut berupa buku publikasi yang ada di Pelayanan

Statistik Terpadu (PST). Mutasi transaksi aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	176.544.159
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	80.929.057
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	(402.717)
Saldo per 31 Desember 2016	257.070.499
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku per 31 Desember 2016	257.070.499

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.
(10.940.908.
830)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. (10.940.908.830) dan Rp. (9.220.708.172). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2016 dan 2015*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.551.427.229	9.810.420.138	1.741.007.091
2	Gedung dan Bangunan	8.793.256.748	1.130.488.692	7.662.768.056
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	257.070.499	0	257.070.499
Akumulasi Penyusutan		20.601.754.476	10.940.908.830	9.660.845.646

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud Rp.
2.016.058.487

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp. 2.016.258.487 dan Rp. 1.187.004.987.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat statistik Provinsi Lampung berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	1.187.004.987
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	829.053.500
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	2.016.058.487
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	(1.411.061.662)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	604.996.825

Mutasi tambah berupa : transfer masuk berupa software komputer senilai Rp. 829.053.500 Sesuai BAST nomor : BASTP-283/BPS/2520/12/2016, Tanggal : 23 Desember 2016 dari Biro Umum Badan Pusat Statistik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Aset Tak berwujud TA 2016

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	1.954.370.487
Lisensi	61.688.000
Jumlah	2.016.058.487

Aset Lain-
Lain Rp.
641.577.468

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp. 641.577.468 dan Rp. 544.793.468. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	544.793.468
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	96.784.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2016	641.577.468
Akumulasi Penyusutan	(632.425.931)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	9.151.537

Transaksi penambahannya adalah dari reklasifikasi Mini Bus yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp. 93.000.000 dan Tang Kombinasi senilai Rp. 3.784.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
(2.043.487.5
93)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. (2.043.487.593) dan Rp. (521.886.147). Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	1.954.370.487	(1.401.808.462)	3.356.178.949
Lisensi	61.688.000	(9.253.200)	70.941.200
Jumlah	2.016.058.487	(1.411.061.662)	3.427.120.149
Aset Lain-lain	641.577.468	(632.425.931)	1.274.003.399
Jumlah	2.657.635.955	(2.043.487.593)	4.701.123.548

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp. 0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp.
321.113.640*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 321.113.640 dan Rp. 294.680.572. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	280.065.914	Pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan kinerja yang belum dibayar
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	41.047.726	Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum dibayar
Total	321.113.640	

Pendapatan Diterima di Muka Rp. 0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Ekuitas Rp. 12.301.301.724

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.301.301.724 dan Rp. 17.918.635.689. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 12.186.573 dan Rp. 6.844.172. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	10.348.950	5.046.800	105,06
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.837.623	1.797.372	2,24
Jumlah	12.186.573	6.844.172	78,06

- Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya yaitu berupa penjualan publikasi statistik dan data mentah statistik.
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa rumah dinas.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.661.818.566 dan Rp. 7.759.233.881. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 21. Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.557.936.400	3.138.568.800	13,36
Beban Pembulatan Gaji	49.297	56.516	(12,77)
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.063.505.136	955.741.568	11,28
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus)	3.571.581.620	3.228.105.153	10,64
Beban Uang Makan	469.204.000	440.613.000	6,49
Jumlah	8.662.276.453	7.763.085.037	11,58
Pengembalian beban gaji pokok	304.500	2.220.000	(86,28)
Pengembalian beban pembulatan gaji	387	11.156	(96,53)
Pengembalian beban tunjangan struktural	0	1.620.000	-
Pengembalian beban uang makan PNS	153.000	0	100,00
Jumlah	8.661.818.566	7.759.233.881	11,63

Beban Persediaan Rp.
1.777.507.354

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.777.507.354 dan Rp. 1.067.246.541. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.777.507.354	872.746.541	103,67
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	194.500.000	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	100,00
Jumlah	1.777.507.354	1.067.246.541	66,55

Beban Barang dan
Jasa Rp.
3.221.042.677

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.221.042.677 dan Rp. 2.741.481.558. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	257.943.766	231.053.001	11,64
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.750.000	-	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.033.539	12.976.752	-45,80
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109.770.000	68.520.000	60,20
Beban Barang Operasional Lainnya	-	31.828.000	0,00
Beban Bahan	599.999.100	243.570.109	146,34
Beban Honor Output Kegiatan	1.439.505.510	1.482.022.850	-2,87
Beban Barang Non Operasional Lainnya	70.546.500	238.108.360	-70,37
Beban Langganan Listrik	397.222.193	259.667.788	52,97
Beban Langganan Telepon	12.540.069	15.228.698	-17,66
Beban Sewa	241.745.000	52.606.000	359,54
Beban Jasa Profesi	4.200.000	66.300.000	-93,67
Beban Jasa Lainnya	70.787.000	39.600.000	78,76
Jumlah	3.221.042.677	2.741.481.558	17,49

Beban Pemeliharaan
Rp. 324.341.500

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 324.341.500 dan Rp. 299.848.037. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.778.406	74.535.000	33,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.075.694	225.243.037	(0,52)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	487.400	70.000	596,29
Jumlah	324.341.500	299.848.037	8,17

Beban Perjalanan Dinas Rp. 18.508.870.462

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.508.870.462 dan Rp. 7.697.674.652. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kegiatan pelatihan petugas listing SE2016. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	390.544.712	971.447.229	(59,80)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	758.655.000	864.878.000	(12,28)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.960.244.750	5.529.724.423	134,37
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.403.926.000	331.625.000	1227,98
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(4.500.000)	-	100,00
Jumlah	18.508.870.462	7.697.674.652	140,45

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 542.544.486. Beban Barang untuk

Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	104.807.000	0,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	437.737.486	0,00
Jumlah	0	542.544.486	0,00

Pada tahun 2016 tidak terdapat beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dikarenakan telah dilakukan koreksi terhadap akun barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, dan persediaan dalam rangka bantuan sosial berdasarkan surat Sestama Nomor : B-311/BPS/2520/04/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Temuan BPK RI atas ketidaktepatan pada akun persediaan.

*Beban Bantuan Sosial
Rp. 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.
2.128.610.758

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.128.610.758 dan Rp. 1.992.139.754. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2016 dan 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.756.187.129	1.792.779.976	(2,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	180.060.074	178.018.278	1,15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	1.936.247.203	1.970.798.254	(1,75)
	-	-	0,00
Beban Amortisasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional	13.755.786	21.341.500	(35,54)
Beban Amortisasi Software	68.807.281	-	100,00
Beban Amortisasi Lisensi	6.168.800	-	100,00
Jumlah Amortisasi	88.731.867	21.341.500	315,77
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.024.979.070	1.992.139.754	1,65

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Rp.
72.447.780

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	619.500	0,00
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	0	2.630.000	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	13.866.500	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15.610.564	0	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	88.058.344	0	100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	72.447.780	17.116.000	323,28

*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa Rp. 0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
17.918.635.689*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.918.635.689 dan Rp. 14.679.058.908.

*Defisit LO
Rp. (34.433.925.276)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (34.433.925.276) dan Rp. (22.090.075.237). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus /defisit kegiatan operasional, surplus /defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp. 0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 15.644.943. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp. 0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. (1.234.030.126)

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (1.234.030.126) dan Rp. 39.189.97. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 29. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.576.233)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(1.232.453.893)
Jumlah	(1.234.030.126)

Koreksi Lain-Lain Rp. 0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp. 30.154.253.125

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.154.253.125 dan Rp. 25.274.817.100. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 30. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(12.186.573)
Ditagihkan ke Entitas Lain	30.891.356.487
Transfer Masuk	1.897.185.077
Transfer Keluar	(2.622.101.866)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	30.154.253.125

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp. (12.186.573) sedangkan DKEL sebesar Rp. 30.891.356.487.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.897.185.077 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	BPS RI	1.115.232.084
2	Persediaan	BPS Kab. Mesuji, BPS Kab. Tanggamus dan BPS Kota Bandar Lampung	781.952.993
	Jumlah		1.897.185.077

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. (2.622.101.866) yang merupakan transfer Persediaan dan Peralatan dan Mesin kepada BPS Kab/Kota se-Provinsi Lampung.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	BPS Kab/Kota Se- Provinsi Lampung	(1.635.918.872)
2	Persediaan	BPS Kab/Kota Se- Provinsi Lampung	(986.182.994)
	Jumlah		(2.622.101.866)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp. 0.

*Ekuitas Akhir Rp.
12.404.933.412*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.404.933.412 dan Rp. 17.918.635.689.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung melakukan kerjasama swakelola dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu tentang Penunjukan Tenaga Ahli Khusus Kegiatan Data Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2016.

BPS Provinsi Lampung mendapatkan dana Upaya Percepatan Penyediaan dan Kualitas Data Tanaman Pangan dari kerjasama antara BPS dengan Pusdatin dengan realisasi netto sebesar Rp. 76.678.000

Pada BPS Provinsi Lampung ada kejadian barang hilang (kendaraan bermotor roda 2 (dua)) yang sudah dilakukan proses TGR namun belum diusulkan penghapusannya.

Pada hasil e-rekon BPS Provinsi Lampung terdapat Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp. 7.672 yang bukan merupakan milik BPS Provinsi Lampung. BPS Provinsi Lampung pada tanggal 17 Januari 2017 dengan nomor B-003/18514/I/2017 mengajukan koreksi transaksi penerimaan negara, dan telah disetujui juga sudah dilakukan koreksi oleh KPPN Bandar Lampung sesuai surat nomor S-219/WPB.08/KP.017/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Temuan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 :

1. Terdapat Aset/BMN senilai Rp. 93.000.000 dalam kondisi rusak berat masih tercatat di SIMAK BMN yaitu berupa 1 unit minibus kendaraan roda 4 (3.02.01.02.003.19) Rp. 93.000.000

Tanggapan/Tindaklanjut :

Telah ditindaklanjuti dengan melakukan reklasifikasi aset tersebut menjadi Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Register Transaksi Harian Penghentian penggunaan terlampir (Lampiran-1)

2. Aset/BMN yang sudah dihentikan penggunaannya dari operasional senilai Rp. 170.600.000 belum diusulkan untuk pelelangan/pemusnahan yaitu berupa 2 unit Minibus kendaraan roda 4 (NUP 3.02.01.02.003.15 senilai Rp. 74.600.000 dan 3.02.01.02.003.15 senilai Rp. 96.000.000

Tanggapan/Tindaklanjut :

Telah ditindaklanjuti dengan melakukan permohonan penilaian kepada Dinas Perhubungan sebagai syarat melakukan proses penghapusan. Surat permohonan kepada Dinas Perhubungan terlampir (Lampiran-6)

3. 1 unit rumah dinas (4.01.02.01.001.6) ditempati pegawai namun belum diterbitkan izin penggunaan dan belum dikenakan tarif sewa, serta 1 unit rumah dinas 4.01.02.01.001.7 dalam kondisi kosong, tidak

layak huni dan digunakan untuk menyimpan barang pada BPS Propinsi Lampung

Tanggapan/Tindaklanjut :

- Telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan sewa untuk tahun 2017. SK sewa rumah dinas terlampir. (Lampiran 8)
- Rumah dinas yang tidak layak Sudah diusulkan rehabilitasi untuk tahun 2018. PrintScreen usulan rehabilitasi dalam Master Plan aplikasi SIREKA terlampir (Lampiran 9)

4. Terdapat pembayaran honor kepada 4 petugas pengolahan BPS Propinsi Lampung total senilai Rp6.032.975,00 yang namanya tidak tercantum dalam SK Pengolahan.Pembayaran melalui SPM No. 00176/GU17/2016 tanggal 30 September 2016 (3 orang Petugas Pengecekan Kelengkapan Dokumen, serta 1 orang merupakan Petugas Validasi L1)

Tanggapan/Tindaklanjut :

- Terdapat penambahan petugas (dari SK awal) yang disebabkan karena target waktu yang semakin dekat sementara kecepatan petugas dalam penyelesaian pekerjaan yang ditargetkan tidak tercapai.
- Sudah dilakukan perbaikan SK Petugas Pengolah,. SK Awal dan SK Revisi terlampir (Lampiran-11).

Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016* Beban Amortisasi

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.
		Manfaat		Per 31-12-2015	Tahun 2016	Per 31-12-2016
B	Peralatan dan Mesin					
1	Alat Bantu	7	135.300.000	106.307.144	19.328.570	125.635.714
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.402.215.320	1.185.170.290	8.916.934	1.194.087.224
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	12.724.800	3.784.000	33.440	3.817.440
3	Alat Ukur	5	51.955.300	50.855.300	1.100.000	51.955.300
1	Alat Pengolahan	4	139.921.006	124.048.845	4.130.575	128.179.420
1	Alat Kantor	5	626.833.724	485.261.381	52.907.173	538.168.554
2	Alat Rumah Tangga	5	1.438.245.657	1.237.109.333	127.415.129	1.364.524.462
3	Alat Studio	5	90.183.003	52.158.978	8.617.514	60.776.492
4	Alat Komunikasi	5	4.025.000	1.207.500	805.000	2.012.500
5	Peralatan Pemancar	10	0	1.471.250	(1.471.250)	-
6	Komputer Unit	4	2.169.717.341	1.583.175.229	325.417.377	1.908.592.606
7	Peralatan Komputer	4	5.480.306.078	3.443.758.321	988.912.105	4.432.670.426
	Jumlah		11.551.427.229	8.274.307.571	1.536.112.567	9.810.420.138
C	Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.450.814.348	791.684.525	152.340.096	944.024.621
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.243.803.400	139.250.029	29.625.558	168.875.587
2	Tugu/Tanda Batas	50	98.639.000	15.466.047	2.122.437	17.588.484
	Jumlah		8.793.256.748	946.400.601	184.088.091	1.130.488.692
D	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan					
1	Alat Bantu	7	98.500.000	98.500.000	-	98.500.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	281.440.500	166.083.179	106.205.784	272.288.963
1	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	3.784.000	-	3.784.000	3.784.000
2	Alat Ukur	5	18.546.000	18.546.000	-	18.546.000
1	Alat Pengolahan	4	11.071.500	11.071.500	-	11.071.500
2	Alat Kantor	5	4.984.000	4.984.000	-	4.984.000
1	Alat Rumah Tangga	5	8.551.510	8.001.510	550.000	8.551.510
2	Alat Komunikasi	5	489.000	489.000	-	489.000
1	Komputer Unit	4	130.777.394	130.777.394	-	130.777.394
2	Peralatan Komputer	4	83.433.564	83.433.564	-	83.433.564
	Jumlah		641.577.468	521.886.147	110.539.784	632.425.931
2	Software	4	1.954.370.487	-	1.298.176.774	1.298.176.774
1	Lisensi	10	61.688.000	-	9.253.200	9.253.200
	Jumlah		2.016.058.487	0	1.307.429.974	1.307.429.974
	Total		23.002.319.932	9.742.594.319	3.138.170.416	12.880.764.735